

Tantangan Bantuan Sosial sebagai bagian *Extraordinary Policy Responses* dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Sekilas Tentang Bansos..

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Pasal 1, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Bantuan Sosial (Bansos) melalui K/L dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimulai sejak maret tahun 2020 untuk menysasar masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19.

Bansos berfokus pada masyarakat miskin dan rentan (*Bottom 40*) dengan sumber dana dari Pemerintah (*Non-Contributory System*).

Perkembangan Belanja Bantuan Sosial (Triliun Rp), 2016 - 2021



Dalam lima tahun terakhir, belanja bansos terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama saat munculnya pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, realisasi bansos mencapai Rp202,5 triliun atau setara 1,31 persen terhadap PDB. Peningkatan secara signifikan ini merupakan bentuk respons Pemerintah melalui program PEN untuk menekan dampak pandemi.

Sumber: Kementerian Keuangan 2021

Ringkasan Kebijakan Bansos Reguler dan Bansos ad-hoc dalam PEN

Bansos Reguler Tahun 2020	Anggaran (triliun rupiah)	Bansos Non Reguler/ Bansos dalam PEN Tahun 2020	Anggaran (triliun, Rupiah)
PKH untuk 10 Juta KPM	28,71	Bantuan Khusus Jabodetabek 1,3 juta	7,1
Kartu Sembako 18,8 juta KPM	46,34	BST non Jabodetabek 9 juta KK	32,84
KIP Kuliah 200 rb mahasiswa	1,3	Kartu Pra kerja	19,98
Bantuan Premi JKN	48,8	Bantuan subsidi gaji Kemenaker	29,81
Diskon PLN	11,45	BSU Guru Honoror Kemendikbud	2,94
BLT Dana Desa	22,78	BSU Guru Honoror Kemenag	1,13
PIP	14,46	Subsidi Kuota Internet Kemendikbud	3,82
		Subsidi Kuota Internet Kemenag	0,24
Tahun 2021			
PKH untuk 10 Juta KPM	28,7	Bansos Tunai untuk 10 juta KPM	12
Kartu Sembako 18,8 juta KPM	45,1	Kartu Pra kerja	20
KIP Kuliah untuk 1,2 juta mhsw	10,1	Subsidi kuota internet	4,98
Bantuan Premi JKN	48,8	Iuran JKP-(Ciptaker)	1,55
Diskon PLN	13,5	Cadangan bansos tunai & kuota internet	25,01
BLT Dana Desa	14,4		
PIP	11,1		

Sumber: DJA Kemenkeu 2021, diolah



Tantangan Efektifitas Bansos..

Indikator Kesejahteraan dan Daya Beli Indonesia Tahun 2020-2021

Indikator	Tw 4-2019	Tw1-2021
Kesejahteraan dan Daya Beli		
1. Upah Riil Buruh Tani (Rp)*	52.571	56.549
2. Upah Riil Harian Buruh Bangunan (Rp)*	85.981	90.971
	Jan-feb 2020	Maret-Mei 2021
Indeks Keyakinan **	119,70	104,40
Indeks Ekonomi saat ini	107,55	86,80
Penghasilan Saat ini	115,75	95,30
Ketersediaan Lapangan Kerja	93,85	77,40
Pembelian Durable Goods	113,00	83,70

Ket* Data rata-rata kuartalan ** Data sudah tersedia hingga Mei 2020

Sumber: Bank Indonesia, 2021 (diolah)

Dilihat dari beberapa indikator pada gambar di samping, seolah memperlihatkan bahwa kerja keras yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah sebelum terjadinya pandemi Covid-19 untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi seolah menjadi tidak terlihat. Sebaliknya, dibutuhkan kerja yang ekstra keras untuk tidak hanya segera keluar dari pandemi Covid-19, namun juga segera mengembalikan perekonomian ke kondisi sebelum terjadinya pandemi.

Tantangan utama pada program bansos adalah masih besarnya salah sasaran (*targeting error*), baik *inclusion* maupun *exclusion error*. Kesalahan-salahan terjadi pada hampir seluruh program bansos dengan tingkat kesalahan terparah pada program Bantuan Pangan (Kem PPKF, 2021) Masalah pada *targeting* tersebut akan membuat komplementaritas antar program dengan masih sedikitnya kelompok desil terbawah yang menerima lebih dari satu program serta keluarga di kelompok 20 persen berpenghasilan terendah yang belum mendapatkan bansos, sebaliknya terdapat keluarga di kelompok menengah dan kaya yang menerima bansos (Kemenkeu 2021).

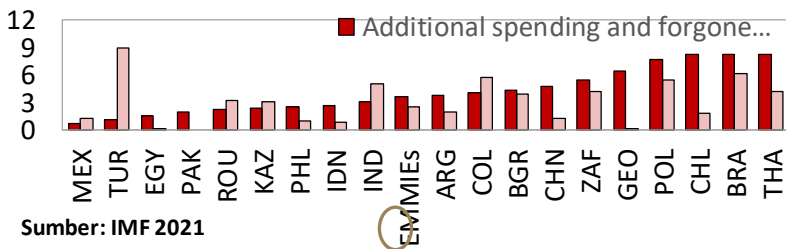
Tantangan lainnya adalah mekanisme bansos yang ada saat ini masih belum cukup memadai dalam merespons kondisi krisis seperti pandemi COVID-19 secara adaptif. Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi Pemerintah untuk menyiapkan skema bansos yang lebih fleksibel dan responsif dalam keadaan krisis namun tetap secara efektif menjangkau masyarakat yang terdampak.

Kebijakan Bansos Negara lain..

1. AMERIKA SERIKAT, sebanyak 159 juta cek BLT yang masing-masingnya bernilai US\$ 1.200 dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Program tersebut kini memang sudah berakhir. Namun pembahasan program lanjutannya saat ini masih akan berlanjut di Kongres AS.

1. BRAZIL, Untuk mengurangi dampak COVID-19, pemerintah mengumumkan serangkaian langkah fiskal pada tahun 2020 menambahkan hingga 12 persen dari PDB, di mana dampak langsung pada defisit primer mencapai 7,2 persen dari PDB. Langkah-langkah fiskal termasuk perluasan pengeluaran kesehatan, dukungan pendapatan sementara untuk rumah tangga rentan – transfer tunai kepada pekerja informal dan berpenghasilan rendah (program Bantuan Darurat), memajukan pembayaran pensiun ke-13 untuk pensiunan, memperluas program *Bolsa Familia* dengan memasukkan lebih dari 1 juta penerima manfaat, dan pembayaran bonus gaji di muka untuk pekerja berpenghasilan rendah. Sebagian besar tindakan telah berakhir pada akhir tahun 2020, tetapi Program Bantuan Darurat dan dukungan pekerjaan diperbarui pada kuartal kedua tahun 2021.

Respons Diskresi Fiskal terhadap Krisis COVID-19 di beberapa Negara Berkembang (% thd PDB)



Sumber: IMF 2021

Berdasarkan gambar di samping Pengeluaran tambahan dan pendapatan yang hilang Indonesia lebih besar dibandingkan dengan Ekuitas, pinjaman, dan jaminan yang tersedia. Meskipun dibenarkan dan bahkan penting, tindakan diskresi fiskal agresif ini bukannya tanpa biaya. Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat memperkirakan bahwa pandemic Covid-19 telah meningkatkan defisit tahun ini dari sekitar \$1 triliun menjadi \$3,7 triliun. Utang nasional lebih dari \$26 triliun. Secara bersama-sama, menjadi sangat penting untuk berpikir ke depan tentang bagaimana melanjutkan strategi pemulihan lebih lama dari yang diperkirakan untuk melawan krisis ekonomi. Hal ini sangat mendasak mengingat meningkatnya risiko tunggakan baik di sektor rumah tangga maupun korporasi dan kondisi pasar kerja yang terus lesu di berbagai negara termasuk Indonesia.

REKOMENDASI..

Jaring pengaman sosial yang didesain bekerja secara otomatis memenuhi tiga kriteria efektivitas stimulus fiskal, yakni *timely* (tepat waktu karena dapat implementasinya segera, tanpa ada time lag); *targeted* (menyasar pada targetnya, kelompok miskin dan rentan, sehingga berdampak langsung pada konsumsi, *hand to mouth*); dan *temporary* (berlaku temporer karena akan selesai seiring dengan pulihnya ekonomi).

1. Mekanisme transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi listrik RT harus menerapkan dua konsep utama, yaitu harga komoditas LPG tabung 3 Kg maupun tarif listrik golongan rumah tangga harus disesuaikan dengan harga keekonomian (*getting the price right*) dan melindungi masyarakat miskin dan rentan (*protect the poor*). Dengan penerapan *targeted* subsidi melalui mekanisme bantuan langsung non tunai.

1. Percepatan pemutakhiran DTKS agar penetapan sasaran bansos sesuai fokus pada masyarakat dengan penghasilan 40 persen terendah dalam pemulihan ekonomi nasional dan meminimisasi *exclusion* maupun *inclusion error* pada program-program yang sifatnya sementara sekalipun.

1. Mekanisme pengawasan bantuan sosial yang lebih komprehensif agar tidak terjadi lagi korupsi serta inefisiensi lainnya yang menghambat program berdampak optimal.

